

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah Chandra M, *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Hiariej Eddy O.S, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- HS Salim, Septiana Nurbani Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Khairandy Ridwan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hiariej Eddy O.S, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012).
- Simangunsong, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Adi Nugroho Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Sofian Ahmad, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 160.

- Sutantio Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Yani Ahmad dan Widjaja Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Amin Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

JURNAL

- Kristiyanto Daniel, "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 1, No. 2, Februari 2018.
- Sultan Alifin Lalu, Asikin Zainal, dkk, "Kedudukan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Open Journal Systems*, Vol. 3, No. 10, Mei 2019
- Triyanto Gatot, "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Kasidin Sunarko, "Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Diluar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 KUHAP", *Focus Jurnal of Law*, Vol.2, No. 1, Oktober 2021.
- Yunita Priyanka Ghina, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Praperadilan Atas Dasar Ketidakterpenuhan Pasal 17 Dan Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/PID.PRA/2017/PN.Dps", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3, September-Desember 2021.
- O. Hendriks Pricila, "Pembatalan Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktek Jual Beli Perumahan", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016.
- Supianto, "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Anto Fendi, Nur Widyaningsih Febriana, dkk, "Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam di Indonesia", *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022.
- Asadullah Hasan Al Asy'arie Mohammad, Handoko Widhi, "Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Notaris*, Vol. 16, No. 2, 2023.
- Novi Anggoro Firna, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2022.
- Effendi Zulham, Lumban Gaol Selamat, Darwis Nurlily, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi

- Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Intelktualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023.
- Akhyar Zainul, Matnuh Harpani, Hardianto, “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Banjar”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 10, November 2015.
- Ali Safa’at Muchamad, “Kewenangan KPPU dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Pelaku Usaha”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 4 No. 1, April 2011.
- Hiariej Eddy O.S, “Prinsip Ne bis in idem Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Fajar Hidayat Muhammad, Rika Vintar Daluas Aritolang, Hani Lavea, “Analisis Asas Ne bis in idem Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2024.
- Ari Astuti Rini, “Analisis Asas Ne bis in idem Dalam Perkara Pidana Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol.1, No. 2, 2020.
- Endah Lestari Sri, “Reinterpretasi Asas Ne bis in idem Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Bintara*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Erlina Agung Erdianto Rika, “Asas Ne bis in idem Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Kajian Normatif,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Fitriani Nurhayati, “Penerapan Asas Ne bis in idem Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Putra Mokoagow Addy, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. V, No.4, 2015.
- Suhendriyatno, “Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-PdgSbr/II/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/PN Pdg)”, *Swara Justisia*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020.
- Kristiyanto Daniel, “Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 1, No. 2, Februari 2018.
- Cherina Apriliasari Mantrawan Made, I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Bersifat Final dan Mengikat?”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 13, No. 2, Juli 2024.
- Rimanda Rahmi, “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No.1, 2019.
- Eka Yudha Nano, Kusbianto, dkk, “Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri, *Law Jurnal*, Vol. VI, No. 1, Juli 2025.

- Maria, Rizka Amelia Azis, "Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dipenuhinya Barang yang Telah Dijanjikan Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan 257 K/Pdt.sus-BPSK/2019)", *Forum Ilmiah*, Vol. 17, No. 3, September 2020.
- Suhendriyatno, "Kekuatan Mengikat Putusan BPSK Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/BPSK-Pdg-Sbr/Ii/2019 dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PnP dg)", *Swara Justisia*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020.
- M. D. Emping Fladi, "Kedudukan dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Perspektif Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 2, Februari 2018.
- Setiyono, "Pengujian Bukti Permulaan yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Melalui Lembaga Praperadilan", *Lex Jurnalica*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2024.
- Menda Sinulingga Sri, "Kekuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Bersifat Final dan Mengikat di Indonesia", *Judicial*, Vol. XIV, Mei 2018.
- Ari Leonard Barus Mario, Laksmi Anindita Sri, "Kompetensi Mutlak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Lelang Barang Gadaai: Studi Putusan Nomor 16 Pk/Pdt.Sus-BPSK/2020", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No.3, 2023.

SKRIPSI

- Fransiskus Silalahi Tegar, "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN Mdn)", Skripsi, Universitas Medan Area Medan, 2023.
- Artha Dinanty Rezna, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/ BPSK-DKI/X/2019)", Skripsi, Universitas Kristen Indoneisa Negeri Syarif Jakarta, 2023.
- Adha Mahendra Hakim, "Bentuk Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Melindungi Hak Konsumen Di Yogyakarta", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Arif Muhammad, "Analsis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Ditinjau Dari Ratio Legis Amandemen UUD NRI 1945 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden" Tesis, Universitas Hasanudin Makassar, 2022.

WEBSITE

- Patriani Fepi, “Bukti Permulaan Yang Cukup”, 02 April, Diakses Pada 12 Maret 2025, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/bukti-permulaan-yang-cukup6028#>.
- Subha Rahman, “Arti Bukti Permulaan Yang Cukup”, 26 Oktober 2022, Diakses Pada 12 Maret 2025, <https://pinterhukum.or.id/arti-bukti-permulaan-yang-cukup/>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat PANJA, Tertanggal 15 Maret 1998, Diakses pada hari Jumat, 18 Juli 2025, <https://www.dpr.go.id/dokumen/arsip/arsip-legislasi/detail/67>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses pada hari Jumat, 18 Juli 2025, <https://jdih.kemendag.go.id/monografi/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-perlindungan-konsumen>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diakses pada hari Sabtu, 19 Juli 2025, <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/149>.
- Fahmi Rozi, Ne bis in idem dalam Perkara Perdata, Diakses Pada Sabtu, 18 Juli 2025, [Nebis in Idem dalam Perkara Perdata - RFA Law Office](#).
- Togar Julio Parhusip, “Cara Ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat”, Diakses Pada 13 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat-lt5f93bb06c2af9/#_ftn4n.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan/atau *Rechtsreglement voor Buitengewesten (RBg)*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA